

**KEBIJAKAN INDONESIA DI BIDANG KEAMANAN MARITIM TERKAIT ILLEGAL,
UNREGULATED, AND UNREPORTED (IUU) FISHING MELALUI KEBIJAKAN
SINKING SHIPS PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PERIODE 2014-2019**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan penenggelaman kapal asing atau *sinking ships* untuk menangani praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia pada tahun 2014-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Indonesia di bidang keamanan maritim terkait dengan IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships* pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri, konsep keamanan maritim, dan konsep IUU Fishing untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Periodeisasi dalam penelitian ini dibatasi pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama, yang pada saat itu Kementerian Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Menteri Susi Pudjiastuti yaitu dari tahun 2014 hingga 2019. Hasil penelitian ini adalah alasan yang membuat pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan visi Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, selain itu adanya hukum nasional yang mengatur terkait pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini, dengan hasil penelitian bahwa penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing yang dilakukan pada masa Menteri Pudjiastuti dinilai cukup efektif menekan angka *illegal fishing* di Indonesia melihat jumlah kapal yang ditenggelamkan mengalami penurunan di beberapa tahun tertentu, nilai tukar nelayan sepanjang 2015-2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan meningkatnya rata-rata pendapatan nelayan di tiap tahunnya selama 2015-2019, serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat respon yang beragam baik respon positif maupun respon negatif dari dalam dan luar negeri.

Kata Kunci: *IUU Fishing, keamanan maritime, kebijakan penenggelaman kapal, pemerintahan Joko Widodo*

ABSTRACT

This study discusses how the policy of sinking foreign ships or sinking ships to deal with illegal fishing practices in Indonesia in 2014-2019. This study aims to describe Indonesia's policies in maritime security related to IUU fishing through the sinking ships policy during the 2014-2019 period of Joko Widodo's administration. The research method used is descriptive qualitative research. In this study, the author uses the theory of foreign policy, the concept of maritime security, and the concept of IUU Fishing to conduct the analysis in this study. The periodization in this study is limited to the first period of Joko Widodo's administration, at which time the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries was held by Minister Susi Pudjiastuti, namely from 2014 to 2019. The results of this study are the reason why the government's used to issue this policy based on efforts to realizing Joko Widodo's vision to make Indonesia a global maritime fulcrum, in addition to the existence of a national law that regulates the implementation of the sinking ships policy, with the results of research that the implementation of the foreign ship sinking policy carried out during the time of Minister Susi Pudjiastuti was considered quite effective in reducing the number of illegal fishing in Indonesia. See the number of sunken boats has decreased in certain years, and the fisherman's exchange rate during 2015-2019 has increased every year, the average income of fishermen has increased each year during 2015-2019, and in the implementation of the policy, get a various responses from within the country.

Keywords: *IUU Fishing, maritime security, sinking ships policy, Joko Widodo's government*